

Abstrak

Split-ticket voting adalah fenomena yang lahir akibat adanya bermacam pemilihan, seperti misalnya pemilihan legislatif (DPR) dan pemilihan eksekutif (presiden). Jika pemilih memilih calon yang berbeda untuk beberapa jenis pemilihan itu, disebut sebagai *split-ticket voting* (Kang, 2006:82). Misalnya untuk pemilu legislatif memilih Partai Golkar, sementara untuk pemilu presiden, memilih calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Di sini pemilih membagi suara (*split*) untuk bermacam partai pada beberapa jenis pemilihan. Fenomena *split-ticket voting* ini kerap terjadi di pemilu Indonesia pasca Orde Baru.

Di Amerika Serikat dan Eropa kajian *split-ticket voting* sudah cukup lama dan karena itu telah terbangun sejumlah teori dominan. Setidaknya ada lima teori dominan yang dipakai menjelaskan terjadinya *split-ticket voting*. Pertama, teori keseimbangan yang diperkenalkan oleh Morris P. Fiorina (lihat Fiorina 2003; 1992). Kedua, teori konflik harapan dari Gary Jacobson (lihat Jacobson, 1991). Ketiga, teori kepemilikan isu dari John Petrocick (lihat Zubida, 2006; Bloom, 2001). Keempat, teori *check and balance*. Dan kelima, teori pemasaran politik.

Semua teori di atas melihat pemecahan suara (*split*) adalah bagian dari strategi pemilih dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk moderasi atau keseimbangan ideologi (Fiorina), untuk memuaskan kebutuhan pemilih yang beragam (Jacobson), cara pemilihan yang berbeda (Petrocick), menciptakan kontrol di pemerintahan (*check and balances*) atau karena memenuhi ekspektasi pesan kampanye (pemasaran politik). Meskipun motivasi pemilih berbeda, tetapi yang menyatukan semua teori adalah pemilih dianggap cukup pengetahuan, cukup kemampuan, dan melakukan pemecahan suara (*split*) atas dasar intensi tertentu.

Karena konteks yang berbeda, yakni konteks pemilih, sistem pemilu, serta sejarah dan praktek kepartaian berbeda, maka teori-teori di atas diduga kurang relevan untuk negara berkembang dan demokrasi muda seperti Indonesia. Untuk itu peneliti merumuskan penjelasan *split-ticket voting* Indonesia yang disebut sebagai model *low information*. Hasil survei nasional dan analisa menunjukkan bahwa model dominan yang banyak diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa tidak bisa menjelaskan fenomena *split-ticket voting* di Indonesia. Sementara, model *low information* cukup baik dalam menjelaskan perilaku *split-ticket voting* di Indonesia dalam pemilu 2014.

Abstract

Split-ticket voting is a political phenomenon that is resulted by the existence of a variety of elections, such as legislative election and presidential election. Split-ticket voting happens when voters vote for candidates from different political parties in legislative election and presidential election (Kang, 2006: 82). An example would be when one votes for Golkar party in legislative election but votes for the presidential candidate nominated by Democrat party. This phenomenon is new but pervasive to Indonesian post-Suharto elections

In the United States and Europe, split-ticket voting is a subject that has been extensively studied. There are at least five established explanations on split-ticket voting. First, moderation theory introduced by Morris P. Fiorina (see Fiorina 2003; 1992). Second, conflicting expectation theory by Gary Jacobson (see Jacobson, 1991). Third, issue ownership theory by John Petrocick (see Zubida, 2006; Bloom, 2001). Fourth, check and balance theory. And fifth, political marketing theory.

All dominant theories assume that split-voting is an intentional act and part of voter's voting strategy. Such as to moderate ideology of the government (Fiorina), or to meet various expectations of voters (Jacobson), or to accommodate different way of voting in legislative and presidential election (Petrocik), or to control the government (check and balance), or to respond to campaign messages sent by parties or candidates (political marketing). Although voters may have different motives, the under laying assumption of all the above theories are identical, that voters have enough information and capabilities as well as the intention to conduct split-voting.

Due to their respective context, such as the condition of voters, election systems, as well as the history and political habits of political parties, it is argued that the so called dominant theories of split-ticket voting is not relevant to a developing and young democracy such as Indonesia. In this dissertation, the researcher proposes an alternative explanation for split-ticket voting in Indonesia that is called low-information model. Two national surveys were conducted for Indonesia's 2014 elections. Data analysis show that prevailing theories from the US and Europe are not applicable for Indonesian election. In the mean time, the low-information model works better in explaining split-ticket voting phenomenon on Indonesia's 2014 election.